Journal of Instructional and Development Researches
Homepage: https://www.journal.iel-educationorg/index.php/JIDeR
e-ISSN: 2807-5471; p-ISSN: 2807-548X

JIDeR, Vol. 6, No. 5, October 2026
© 2026 Journal of Instructional and Development Researches
Page: 838-850

Transformasi Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam di Era Kecerdasan Artifisial: Tantangan dan Tata Kelola Berbasis Nilai Islam

***Syifa Adilla Zahra, Syifaul Karima, Nirva Diana, Deden Makbuloh, Sunarto**
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
*Email: Syifaadilla204@gmail.com (Corresponding Author)

Check for updates OPEN ACCESS

DOI: https://doi.org/10.53621/dygzvq92

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:
Diterima: 18 Oktober 2026
Revisi Akhir: 1 November 2026
Disetujui: 2 November 2026
Terbit: 4 November 2026

Kata Kunci:
Tata Kelola AI; Transformasi Kebijakan; Kepemimpinan Pendidikan Islam.

ABSTRAK

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) mendorong transformasi kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam, sekaligus menghadirkan tantangan etika, integritas akademik, perlindungan data, dan keadilan akses. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan transformasi kebijakan, perubahan peran kepemimpinan, serta merumuskan kerangka tata kelola AI yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis melalui analisis isi deskriptif-kritis, perbandingan antara sumber, dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi pendidikan Islam memerlukan kebijakan adaptif, kepemimpinan strategis-humanistik, tata kelola AI yang bertanggung jawab, integrasi nilai amanah, keadilan, kejujuran, dan tabayyun, serta evaluasi kelembagaan berkelanjutan. Artikel ini mengusulkan kerangka transformasi yang mengintegrasikan kebijakan, kepemimpinan, tata kelola berbasis nilai Islam, dan evaluasi untuk mendukung pemanfaatan AI secara etis, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan akhlak peserta didik.

PENDAHULUAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah cara lembaga pendidikan mengelola informasi, melaksanakan pembelajaran, mengembangkan sumber belajar, dan mengambil keputusan. Teknologi generatif memungkinkan pendidik menyusun bahan ajar, mengembangkan variasi evaluasi, serta menyelesaikan tugas administratif secara lebih efisien. Namun, transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga menyangkut arah kebijakan, pembagian tanggung jawab, perlindungan data, integritas akademik, dan kualitas interaksi manusia dalam pendidikan. (Chan, 2023) menekankan pentingnya kerangka kebijakan AI yang mempertimbangkan peluang pedagogis sekaligus persoalan etika dan integritas akademik. (Kasneci, 2023) menjelaskan bahwa penggunaan model bahasa besar dalam pendidikan menawarkan peluang untuk mendukung pembelajaran, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait keandalan informasi, bias, dan integritas akademik. Sementara itu, (Celik, 2023) menegaskan pentingnya kompetensi dan pertimbangan pedagogis guru dalam mengintegrasikan teknologi AI secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam memerlukan kebijakan dan kepemimpinan yang tidak hanya mendorong inovasi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa penerapannya selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Dalam konteks pendidikan Islam, transformasi tersebut memiliki dimensi yang lebih luas karena lembaga pendidikan tidak hanya bertugas menghasilkan peserta didik yang menguasai pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak, tanggung jawab moral, dan kepribadian religius. Madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam menghadapi
kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan identitas kelembagaan dan tujuan pendidikan Islam. (Nurul et al., 2026) menjelaskan bahwa pemanfaatan AI dalam pendidikan Islam perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas pembelajaran tanpa mengesampingkan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral peserta

didik. Selain itu, (M. Yusuf & Sarkar, 2026) mengidentifikasi sejumlah persoalan etis dalam penggunaan AI di lembaga pendidikan Islam, termasuk perlindungan privasi, bias algoritma, dan berkurangnya otonomi manusia. Dari sisi peserta didik, penelitian mengenai ketergantungan AI dalam pembelajaran juga menunjukkan adanya risiko penyebaran informasi keliru, penurunan kreativitas, serta melemahnya kemampuan berpikir kritis dan mandiri (Zhang et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi AI dalam pendidikan Islam perlu disertai kebijakan kelembagaan, pendampingan pendidik, dan penguatan nilai-nilai amanah, tanggung jawab, serta *tabayyun* agar teknologi mendukung pencapaian tujuan pendidikan tanpa mengurangi dimensi moral dan spiritualnya.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika pemanfaatan AI berkembang lebih cepat daripada kesiapan kebijakan dan sumber daya manusia. Penelitian (Mona Novita, Zulhimma, Zahid Zufar At Thaariq, 2024) mengenai tata kelola AI generatif di 15 Madrasah Aliyah di Provinsi Jambi menemukan persoalan kekosongan tata kelola, ketergantungan birokratis pada madrasah negeri, serta keterbatasan sumber daya pada sebagian madrasah swasta. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan integrasi AI tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan aplikasi, tetapi memerlukan kepemimpinan yang mampu menetapkan arah, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Dari perspektif kebijakan, persoalan mendasar terletak pada bagaimana lembaga pendidikan Islam merumuskan aturan yang mampu membedakan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendukung pembelajaran dari penggunaan yang menghilangkan proses berpikir dan tanggung jawab akademik. Kebijakan yang terlalu membatasi dapat menghambat inovasi, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai keaslian karya, keamanan informasi, dan batas tanggung jawab pengguna. (Supriyono & Prihandono, 2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran menghadirkan tantangan berupa ketergantungan teknologi, keakuratan informasi, privasi, serta etika akademik dan plagiarisme. Temuan tersebut menegaskan perlunya pengawasan dan aturan penggunaan AI yang jelas agar pemanfaatannya tetap mendukung tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan kebijakan yang adaptif dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan integritas akademik, perlindungan data, kemandirian berpikir, serta pembentukan akhlak peserta didik.

Selain persoalan kebijakan, transformasi pendidikan Islam juga berkaitan dengan perubahan peran kepemimpinan. Kepala madrasah, pimpinan pesantren, dan pimpinan perguruan tinggi Islam tidak cukup bertindak sebagai administrator yang mengatur sarana dan kegiatan rutin. Mereka perlu menjadi pemimpin strategis yang mampu membaca perubahan teknologi, mengembangkan kapasitas pendidik, membangun budaya inovasi, serta memastikan bahwa keputusan berbasis data tetap berada dalam kendali dan tanggung jawab manusia. (Fullan et al., 2024) membahas tantangan, peluang, dan implikasi AI bagi kepemimpinan sekolah, termasuk kebutuhan untuk mempertimbangkan perubahan organisasi dan peran pemimpin dalam menghadapi teknologi baru.

Dalam kerangka pendidikan Islam, kepemimpinan perlu berlandaskan nilai amanah, keadilan, musyawarah, keteladanan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut tidak cukup ditempatkan sebagai slogan normatif, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan operasional. (Agil Husain Abdullah, Aripuddin, Nurkhalishah, 2025) menjelaskan bahwa prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan keteladanan merupakan landasan penting dalam kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Sejalan dengan itu, (Rochim & Muttaqien, 2025) menegaskan bahwa integrasi nilai keadilan, amanah, dan musyawarah dalam manajemen pendidikan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang inklusif dan bertanggung jawab. Dalam konteks transformasi digital, (Primus Sanbein, 2026) menyoroti pentingnya tata kelola AI yang etis, penguatan integritas akademik, dan kesiapan institusi dalam menghadapi perubahan teknologi. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan Islam perlu mengintegrasikan kompetensi manajerial modern dengan orientasi etis dan spiritual, misalnya melalui perlindungan data peserta didik sebagai bentuk amanah, pemerataan akses teknologi sebagai wujud keadilan, serta

pelibatan guru, orang tua, dan warga madrasah dalam perumusan kebijakan melalui musyawarah.

Sejumlah penelitian telah membahas AI dalam pendidikan, kebijakan penggunaan teknologi, kepemimpinan digital, dan etika pendidikan Islam. Akan tetapi, pembahasan mengenai pemanfaatan AI seringkali menitikberatkan aspek pembelajaran atau kompetensi pengguna, sementara hubungan antara kebijakan kelembagaan, kepemimpinan strategis, dan prinsip tata kelola berbasis nilai Islam masih perlu disintesiskan secara lebih terarah. Kajian tentang kepemimpinan pendidikan Islam berorientasi Islami oleh (Primus Sanbein, 2026) memberikan landasan untuk memahami kekhasan kepemimpinan sekolah dalam masyarakat Muslim, terutama dalam menghubungkan nilai-nilai Islam dengan praktik kepemimpinan pendidikan.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada sintesis konseptual yang mengintegrasikan kebijakan adaptif, kepemimpinan strategis-humanistik, tata kelola AI berbasis nilai Islam, dan evaluasi kelembagaan ke dalam satu kerangka transformasi. Kerangka ini memandang AI bukan sebagai tujuan akhir modernisasi, melainkan sebagai sarana yang harus diarahkan oleh tujuan pendidikan, akuntabilitas manusia, keadilan akses, dan pembentukan akhlak. Karena menggunakan metode *library research*, kebaruan yang diajukan merupakan kontribusi konseptual hasil sintesis literatur, bukan klaim bahwa kerangka tersebut telah terbukti secara empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana permasalahan dan kebutuhan transformasi kebijakan pendidikan Islam di era AI; (2) bagaimana perubahan peran kepemimpinan pendidikan Islam dalam mengarahkan pemanfaatan AI secara strategis dan etis; serta (3) bagaimana merumuskan kerangka transformasi kebijakan dan kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam? Penelitian ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan tersebut melalui analisis literatur dan menghasilkan rekomendasi konseptual yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan tata kelola lembaga pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji, membandingkan, dan mensintesiskan gagasan akademik mengenai kebijakan pendidikan, kepemimpinan, kecerdasan artifisial, dan nilai-nilai pendidikan Islam berdasarkan sumber tertulis yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah, publikasi lembaga internasional, dokumen kebijakan, dan literatur akademik yang membahas penggunaan AI dalam pendidikan, kepemimpinan pendidikan digital, tata kelola teknologi, serta etika pendidikan Islam. Penelusuran sumber dilakukan melalui laman jurnal ilmiah, penerbit akademik, dan situs resmi lembaga yang relevan. Literatur periode 2023–2026 menjadi prioritas untuk memperoleh gambaran perkembangan mutakhir, sedangkan sumber konseptual yang lebih lama dapat digunakan apabila diperlukan untuk memperjelas landasan teori.

Pemilihan literatur didasarkan pada empat kriteria. Pertama, sumber membahas secara langsung atau relevan dengan kebijakan pendidikan, kepemimpinan, AI, atau tata kelola teknologi. Kedua, sumber memiliki identitas publikasi yang dapat ditelusuri. Ketiga, sumber memuat pembahasan konseptual, temuan penelitian, atau rekomendasi yang dapat mendukung pertanyaan penelitian. Keempat, sumber dapat digunakan untuk membandingkan perspektif internasional dengan kebutuhan pendidikan Islam di Indonesia.

Analisis dilakukan menggunakan analisis isi secara deskriptif-kritis melalui empat tahapan. Pertama, identifikasi sumber, yaitu mengumpulkan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, kategorisasi tematik, dengan mengelompokkan sumber ke dalam tema kebijakan, kepemimpinan, tata kelola AI, etika Islam, dan evaluasi. Ketiga, perbandingan kritis, yaitu mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keterbatasan, serta hubungan antar gagasan dalam literatur. Keempat, sintesis konseptual, yaitu menyusun hubungan antar tema untuk menghasilkan kerangka transformasi kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam di era AI.

Keabsahan argumentasi dijaga melalui perbandingan lintas sumber dan perbedaan antara temuan empiris yang dilaporkan oleh penelitian terdahulu dengan interpretasi konseptual penulis. Karena penelitian ini tidak melibatkan wawancara, observasi lapangan, atau pengumpulan data primer, hasilnya tidak dimaksudkan untuk menggambarkan secara statistik kondisi seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Hasil penelitian berupa sintesis konseptual yang dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan sintesis literatur, transformasi kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam di era *Artificial Intelligence* (AI) dapat dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yaitu rekonstruksi kebijakan, transformasi peran kepemimpinan, tata kelola AI yang bertanggung jawab, integrasi nilai-nilai Islam, serta evaluasi kelembagaan. Kelima tema tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pemanfaatannya. Hasil sintesis ini selanjutnya digunakan untuk merumuskan kerangka transformasi kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan.

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Islam di Era AI

Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan dari pendekatan yang berorientasi pada penggunaan teknologi menuju pendekatan tata kelola yang terencana dan bertanggung jawab. Kebijakan tidak cukup hanya mengatur boleh atau tidaknya penggunaan AI, tetapi juga harus menjelaskan tujuan pemanfaatan, batas kewenangan pengguna, perlindungan data, keaslian karya akademik, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Kebutuhan tersebut sejalan dengan kerangka manajemen risiko AI yang dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST). (Tabassi, n.d.) menjelaskan bahwa pengelolaan risiko AI dapat dilakukan melalui empat fungsi utama, yaitu govern, map, measure, dan manage. Kerangka ini menempatkan tata kelola sebagai dasar untuk mengidentifikasi risiko, mengukur dampak, serta menentukan tindakan pengendalian yang sesuai.

Dalam konteks pendidikan Islam, keempat fungsi tersebut dapat diterapkan melalui penetapan aturan penggunaan AI, pemetaan risiko terhadap peserta didik dan lembaga, penilaian terhadap keamanan serta keandalan teknologi, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Misalnya, penggunaan AI untuk membantu penyusunan bahan ajar dapat diperbolehkan dengan kewajiban memeriksa keakuratan informasi. Sebaliknya, penggunaan AI untuk mengambil keputusan penting mengenai peserta didik tanpa pemeriksaan manusia perlu dibatasi karena berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan konteks pendidikan.

Kebijakan juga perlu disusun secara bertingkat. Pada tingkat pemerintah dan penyelenggara pendidikan, diperlukan pedoman umum yang memberikan arah dan standar tata kelola. Pada tingkat lembaga, pedoman tersebut diterjemahkan menjadi aturan internal sesuai karakteristik madrasah, pesantren, atau perguruan tinggi Islam. Pada tingkat pelaksanaan, guru dan tenaga kependidikan memerlukan petunjuk teknis mengenai penggunaan AI dalam pembelajaran, asesmen, administrasi, dan pengelolaan informasi.

Dengan demikian, hasil kajian memperlihatkan bahwa kebijakan yang efektif harus menggabungkan kejelasan aturan, fleksibilitas implementasi, perlindungan terhadap warga lembaga, dan mekanisme pertanggungjawaban. Kebijakan semacam ini memungkinkan lembaga pendidikan Islam memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa kehilangan kendali atas tujuan dan proses pendidikannya.

Transformasi Peran Kepemimpinan Pendidikan Islam

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pemimpin pendidikan Islam perlu mengembangkan peran yang lebih strategis dalam menghadapi perubahan teknologi. Kepala madrasah, pimpinan pesantren, dan pimpinan perguruan tinggi Islam tidak cukup hanya menyediakan perangkat atau mengatur kegiatan administratif. Mereka perlu menentukan arah transformasi, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, membangun budaya inovasi, dan memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap berada dalam kendali manusia.

McIntire, Denecke, dan Duarte (2024), melalui kajian sistematis mengenai AI dalam kebijakan dan kepemimpinan pendidikan, menunjukkan bahwa penelitian yang secara khusus membahas implikasi AI terhadap kepemimpinan dan kebijakan pendidikan masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya memperluas kajian dari penggunaan AI dalam pembelajaran menuju persoalan pengambilan keputusan, tata kelola organisasi, dan tanggung jawab pemimpin. (Mcintire et al., 2024)

Dalam pendidikan Islam, transformasi kepemimpinan dapat diwujudkan melalui tiga peran utama. Pertama, pemimpin sebagai pengarah strategis, yaitu menetapkan visi digital yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kemampuan lembaga. Kedua, pemimpin sebagai pengembang kapasitas, yaitu memastikan guru dan tenaga kependidikan memperoleh pelatihan yang memadai. Ketiga, pemimpin sebagai penjaga etika, yaitu mengawasi agar penggunaan AI tidak mengabaikan integritas akademik, privasi, keadilan, dan pembentukan akhlak.

Peran tersebut juga menuntut pemimpin untuk melibatkan warga lembaga dalam proses perubahan. Guru perlu dilibatkan dalam menentukan kebutuhan pembelajaran, tenaga kependidikan dalam merancang prosedur administrasi, dan orang tua serta peserta didik dalam memahami aturan penggunaan AI. Pelibatan ini penting karena kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengguna berpotensi sulit diterapkan secara konsisten.

Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan Islam di era AI perlu bergerak dari pola administratif menuju kepemimpinan strategis-humanistik. Orientasi tersebut menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat kualitas pendidikan, sedangkan manusia tetap menjadi pihak yang menentukan tujuan, mempertimbangkan nilai, dan bertanggung jawab atas keputusan.

Tata Kelola AI dan Penguatan Kompetensi Digital

Hasil kajian mengidentifikasi bahwa tata kelola AI tidak dapat dipisahkan dari kompetensi pengguna. Kebijakan yang baik akan sulit diterapkan apabila guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik belum memahami cara kerja, keterbatasan, serta risiko penggunaan AI. Sebaliknya, kemampuan menggunakan aplikasi tanpa pemahaman etika dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan informasi, pelanggaran privasi, dan ketergantungan terhadap teknologi.

Pengembangan kompetensi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) dalam pendidikan perlu mencakup keterampilan teknis, kemampuan berpikir kritis, pemahaman etika, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. (Ayunda et al., 2025) menjelaskan pentingnya penguatan literasi digital dan etika AI agar peserta didik mampu memverifikasi informasi, menjaga keamanan data, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Selanjutnya, (Syah et al., 2025) menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab akademik, privasi data, dan sikap kritis dalam penggunaan AI di lingkungan pendidikan. (Pidi & Fahlevi, 2025) menekankan pentingnya nilai-nilai etika digital berbasis kearifan lokal, seperti tanggung jawab, kejujuran, musyawarah, dan rasa hormat, sebagai landasan pemanfaatan AI yang etis di lingkungan sekolah. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut dapat diperkuat melalui prinsip amanah dan *tabayyun*, sehingga peserta didik tidak hanya terampil menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memverifikasi kebenaran informasi, mempertimbangkan dampak moral, serta bertanggung jawab atas penggunaan AI.

Pada tingkat kelembagaan, tata kelola AI perlu mencakup aturan penggunaan yang jelas, verifikasi informasi, perlindungan data pribadi, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan, serta mekanisme penanganan pelanggaran. Dalam perspektif pendidikan Islam, kebijakan

tersebut perlu berlandaskan nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan *tabayyun*, antara lain melalui pemeriksaan kebenaran informasi dan keterbukaan penggunaan AI dalam tugas akademik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi pengguna dan tata kelola kelembagaan saling melengkapi. Kompetensi membantu warga pendidikan memahami manfaat dan risiko AI, sedangkan tata kelola memberikan pedoman serta batasan penggunaannya. Oleh karena itu, transformasi pendidikan Islam di era AI perlu mengintegrasikan literasi digital, nilai-nilai keislaman, dan kebijakan yang adaptif agar teknologi mendukung pembelajaran, kemandirian berpikir, serta pembentukan akhlak peserta didik.

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Tata Kelola AI

Hasil sintesis menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan normatif sekaligus pedoman operasional dalam transformasi pendidikan. Prinsip *amanah*, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan dapat diterapkan untuk mengarahkan penggunaan AI agar tetap berorientasi pada kepentingan manusia dan tujuan pendidikan. (Elmahjub, 2023)

Dalam praktik kelembagaan, amanah dapat diwujudkan melalui perlindungan data peserta didik dan pertanggungjawaban atas penggunaan AI. Keadilan diterapkan melalui pemerataan akses teknologi serta pencegahan bias, sedangkan kejujuran diwujudkan melalui keterbukaan penggunaan AI dalam tugas akademik. Musyawarah dapat diterapkan dengan melibatkan guru, peserta didik, pimpinan, dan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan. Pendekatan berbasis nilai tersebut sejalan dengan (Ahmad et al., 2025) yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan perlindungan privasi dalam pendidikan AI.

Nilai tabayyun juga relevan dalam penggunaan AI karena informasi yang dihasilkan sistem tidak selalu akurat dan dapat mengandung bias. Oleh karena itu, guru dan peserta didik perlu memeriksa informasi melalui sumber yang kredibel sebelum menggunakannya dalam pembelajaran. (Mustapha et al., 2025) menawarkan kerangka TAQIT yang menempatkan tabayyun, akhlak, akal, amanah, dan takwa sebagai prinsip etis dalam penggunaan AI.

Integrasi nilai Islam perlu diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, bukan sekadar pencantuman istilah religius dalam dokumen kelembagaan. Amanah diterapkan melalui prosedur perlindungan data, keadilan melalui kebijakan akses yang inklusif, kejujuran melalui aturan pengungkapan penggunaan AI, dan musyawarah melalui evaluasi kebijakan secara partisipatif. Sejalan dengan (Rifa'i, 2026) , tata kelola AI dalam pendidikan Islam perlu mengintegrasikan amanah, keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan pengawasan manusia.

Dengan demikian, kekhasan transformasi pendidikan Islam bukan terletak pada penolakan terhadap teknologi, melainkan pada kemampuan mengarahkan pemanfaatannya berdasarkan pertimbangan moral, spiritual, dan kemaslahatan. AI dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan, tetapi penggunaannya harus tetap mendukung pembentukan manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab.

Evaluasi dan Keberlanjutan Transformasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam memerlukan evaluasi berkelanjutan. Penerbitan pedoman AI atau penyediaan perangkat digital belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan transformasi. Lembaga perlu menilai apakah kebijakan diterapkan, apakah kompetensi pengguna meningkat, apakah layanan pendidikan menjadi lebih baik, dan apakah risiko penggunaan AI dapat dikendalikan.

Evaluasi dapat dilakukan melalui empat kelompok indikator. Pertama, indikator input, yang mencakup kesiapan infrastruktur, anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan ketersediaan kebijakan. Kedua, indikator proses, yang mencakup pelaksanaan pelatihan, kepatuhan terhadap aturan, pengawasan, dan partisipasi warga lembaga. Ketiga, indikator output, yang mencakup kualitas layanan administrasi, relevansi bahan ajar, dan efektivitas

proses pembelajaran. Keempat, indikator dampak, yang mencakup integritas akademik, pemerataan akses, peningkatan kemandirian belajar, serta penguatan karakter peserta didik.

Evaluasi tersebut perlu dilakukan secara berkala melalui peninjauan dokumen kebijakan, umpan balik guru dan peserta didik, pemeriksaan insiden keamanan, serta analisis hasil pelaksanaan program. Temuan evaluasi kemudian digunakan untuk memperbaiki kebijakan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan menyesuaikan penggunaan teknologi dengan perkembangan kebutuhan lembaga.

Dengan demikian, transformasi pendidikan Islam merupakan proses yang dinamis. Kebijakan memberikan arah, kepemimpinan menggerakkan pelaksanaan, kompetensi memperkuat kapasitas pengguna, dan evaluasi menyediakan dasar bagi perbaikan berkelanjutan.

Pembahasan

Rekonstruksi Kebijakan: dari Adopsi Teknologi menuju Tata Kelola

Kebijakan pendidikan Islam di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) perlu direkonstruksi dari pendekatan yang hanya berorientasi pada adopsi teknologi menuju tata kelola yang menyeluruh. Pendekatan adopsi berfokus pada kemungkinan penggunaan aplikasi, sedangkan pendekatan tata kelola mencakup tujuan penggunaan, pembagian tanggung jawab, pengendalian risiko, serta evaluasi manfaat teknologi. Gagasan ini sejalan dengan (M. Habil Al-Faqih, Rusdiyanur, 2025), yang menempatkan epistemologi Islam, amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai landasan normatif pemanfaatan AI. Dengan demikian, keberhasilan transformasi pendidikan Islam tidak cukup diukur melalui banyaknya aplikasi yang digunakan, tetapi juga melalui kesesuaiannya dengan tujuan pendidikan, nilai-nilai Islam, dan tanggung jawab manusia.

Perbedaan antara adopsi teknologi dan tata kelola menjadi penting karena intensitas penggunaan AI belum tentu menunjukkan peningkatan mutu pembelajaran. AI dapat membantu guru menyusun materi, memberikan umpan balik, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Namun, penggunaan yang tidak disertai pendampingan dapat menimbulkan ketergantungan terhadap jawaban otomatis, mengurangi keterlibatan dalam proses berpikir, dan meningkatkan risiko kesalahan informasi. (Mahani & Ariyani, 2025), membahas peluang pembelajaran adaptif dan interaktif. Sementara itu, (Nun & Mohtarom, 2025) menegaskan pentingnya literasi digital guru, dukungan infrastruktur, dan kebijakan etis dalam integrasi AI pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa manfaat teknologi perlu dipahami bersama dengan persyaratan pedagogis dan etis yang memungkinkan penerapannya berlangsung secara bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, kebijakan lembaga pendidikan Islam perlu memuat sekurang-kurangnya enam komponen. Pertama, tujuan penggunaan AI yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. Kedua, klasifikasi penggunaan yang diperbolehkan, dibatasi, atau dilarang. Ketiga, ketentuan tentang privasi dan keamanan data. Keempat, aturan integritas akademik dan pengungkapan bantuan AI. Kelima, mekanisme pengawasan serta penanganan pelanggaran. Keenam, evaluasi dan revisi kebijakan berdasarkan perkembangan teknologi.

Kebijakan tersebut harus cukup jelas untuk menjadi pedoman, tetapi juga fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Dalam penerapannya, lembaga dapat memulai dari aturan sederhana yang mudah dipahami, kemudian memperluasnya berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi. Dengan cara ini, kebijakan tidak menjadi dokumen administratif semata, tetapi instrumen yang mengarahkan perubahan perilaku organisasi.

Kepemimpinan Strategis-Humanistik dalam Pendidikan Islam

Transformasi kebijakan membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghubungkan visi kelembagaan dengan perubahan praktik sehari-hari. Kepemimpinan strategis-humanistik dalam artikel ini dimaknai sebagai pola kepemimpinan yang menggabungkan perencanaan jangka

panjang, kemampuan beradaptasi, pengembangan kompetensi manusia, dan tanggung jawab moral. (Sianipar & Angelia, 2026)

Pemimpin pendidikan Islam perlu memulai transformasi melalui pemetaan kebutuhan. Madrasah dengan keterbatasan jaringan internet, misalnya, tidak dapat menerapkan strategi yang sama dengan perguruan tinggi yang memiliki infrastruktur digital memadai. Karena itu, keputusan investasi teknologi harus didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan semata-mata mengikuti tren. Pemimpin juga perlu memastikan bahwa pelatihan tidak berhenti pada pengenalan aplikasi, melainkan mencakup verifikasi informasi, keamanan data, etika akademik, dan pemanfaatan AI untuk mendukung proses berpikir. (Muhamad, 2026)

Kepemimpinan humanistik juga menekankan pentingnya pelibatan warga lembaga dalam pengambilan keputusan. Guru perlu diberikan ruang untuk menyampaikan tantangan pedagogis, tenaga kependidikan dilibatkan dalam perancangan alur kerja, dan peserta didik diberikan pemahaman mengenai batas penggunaan AI. Musyawarah dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan, membangun rasa memiliki, serta memastikan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini sejalan dengan Hartono et al. yang mengkaji gaya kepemimpinan kepala madrasah dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan pengembangan budaya kerja guru serta tenaga kependidikan. (Hartono & Ilyasin, 2025)

Pemimpin tetap bertanggung jawab atas keputusan kelembagaan meskipun menggunakan rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem AI. Teknologi dapat membantu menganalisis data, tetapi tidak menggantikan pertimbangan profesional, kepekaan sosial, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin. Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan di era AI ditentukan oleh kemampuan mengendalikan teknologi demi kepentingan pendidikan, bukan oleh tingkat ketergantungan pada teknologi.

Model Tata Kelola AI Berbasis Nilai Islam

Tata kelola AI dalam pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui integrasi prinsip etika universal dan nilai-nilai Islam. (M. Habil Al-Faqih, Rusdiyanur, 2025) menjelaskan bahwa etika pemanfaatan AI dapat dibangun melalui integrasi epistemologi Islam dan prinsip etika teknologi modern, seperti keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Integrasi tersebut menjadi dasar bagi lembaga pendidikan Islam untuk menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam prosedur penggunaan AI yang jelas, bertanggung jawab, dan dapat dievaluasi.

Misalnya, prinsip amanah dapat diterapkan melalui pembatasan akses terhadap data peserta didik dan penetapan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi. Prinsip keadilan dapat diterapkan dengan memastikan bahwa penggunaan AI tidak memperlebar kesenjangan layanan antara peserta didik yang memiliki perangkat dan koneksi internet dengan mereka yang memiliki keterbatasan. Prinsip kejujuran dapat diwujudkan melalui aturan yang meminta peserta didik menjelaskan penggunaan AI dalam tugas ketika bantuan tersebut memengaruhi substansi karya. Adapun prinsip kemaslahatan dapat menjadi dasar untuk menilai apakah manfaat teknologi sebanding dengan risiko yang mungkin muncul. (Waliya Purnama Sari, Syarip, Kasinyo Harto, Mardiah Astuti, 2026)

Perspektif *maqashid al-shariah* juga dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi normatif untuk menilai dampak teknologi terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pendidikan, perlindungan akal relevan dengan upaya mencegah ketergantungan yang melemahkan kemampuan berpikir kritis; perlindungan harta berkaitan dengan keamanan aset dan sumber daya; sedangkan perlindungan jiwa dan martabat manusia berkaitan dengan pencegahan praktik diskriminatif atau keputusan otomatis yang merugikan peserta didik. (Supriatin et al., 2025)

Namun, integrasi nilai Islam tidak cukup dilakukan dengan mencantumkan istilah religius dalam dokumen kebijakan. Setiap prinsip perlu disertai aturan, pelaksana, prosedur, dan indikator evaluasi. Dengan demikian, nilai Islam berfungsi sebagai dasar operasional dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar legitimasi simbolis bagi penggunaan teknologi.

Keadilan Digital dan Kesiapan Kelembagaan

Keadilan digital merupakan persoalan penting dalam transformasi pendidikan Islam. Perbedaan kemampuan finansial, ketersediaan jaringan internet, kualitas perangkat, dan kompetensi pendidik dapat menyebabkan manfaat AI tidak dirasakan secara merata. (B. Yusuf, 2024) menjelaskan bahwa kesenjangan digital dalam pendidikan Islam berkaitan dengan keterbatasan akses perangkat dan koneksi internet, serta perlunya pemerataan infrastruktur dan pelatihan teknologi bagi guru dan peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan pemanfaatan AI perlu mempertimbangkan kesiapan dan kondisi sumber daya setiap lembaga agar madrasah dan pesantren yang memiliki keterbatasan fasilitas tidak semakin tertinggal dalam proses transformasi digital.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemimpin perlu menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan lembaga. Pengadaan perangkat dapat dilakukan secara bertahap, pelatihan dapat dikembangkan melalui komunitas belajar guru, dan penggunaan teknologi dapat disesuaikan dengan infrastruktur yang tersedia. Kerja sama antarlembaga, perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas pendidikan juga dapat membantu memperluas akses terhadap sumber belajar serta pendampingan.

Keadilan digital tidak hanya berarti memberikan perangkat yang sama kepada semua orang. Keadilan juga menuntut dukungan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga guru yang belum memiliki kompetensi memadai memperoleh pendampingan lebih intensif dan peserta didik dengan keterbatasan akses tidak kehilangan kesempatan belajar. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan perlu mengukur siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menghadapi hambatan, dan langkah apa yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan.

Kerangka Konseptual Transformasi Kebijakan dan Kepemimpinan

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini mengusulkan kerangka transformasi yang terdiri atas empat dimensi utama dan satu hasil yang diharapkan. Kerangka tersebut bukan model yang telah diuji melalui penelitian lapangan, melainkan rancangan konseptual yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya.

Tabel. Transformasi Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam di Era AI

Dimensi	Fokus utama	Bentuk implementasi	Indikator keberhasilan
Kebijakan adaptif	Aturan penggunaan AI yang jelas dan fleksibel	Pedoman AI, klasifikasi penggunaan, perlindungan data, dan prosedur pelaporan	Aturan tersedia, dipahami, dan diterapkan
Kepemimpinan strategis-humanistik	Visi, pengambilan keputusan, dan pengembangan manusia	Perencanaan digital, pelatihan, musyawarah, dan pendampingan guru	Peningkatan kesiapan dan partisipasi warga lembaga
Tata kelola AI berbasis nilai Islam	Amanah, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan	Verifikasi keluaran AI, pengawasan manusia, pengungkapan bantuan AI, dan perlindungan peserta didik	Risiko etis terkendali dan integritas akademik terjaga

Dimensi	Fokus utama	Bentuk implementasi	Indikator keberhasilan
Evaluasi berkelanjutan	Pemantauan manfaat dan risiko	Evaluasi berkala terhadap kompetensi, mutu layanan, akses, dan dampak	Kebijakan diperbaiki berdasarkan bukti dan kebutuhan
Hasil yang diharapkan	Transformasi pendidikan Islam yang bertanggung jawab	Integrasi teknologi dengan tujuan pembelajaran dan pembentukan akhlak	Mutu layanan meningkat tanpa mengabaikan nilai pendidikan Islam

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan, kepemimpinan, tata kelola, dan evaluasi merupakan dimensi yang saling bergantung. Kebijakan menyediakan arah dan batas penggunaan; kepemimpinan menggerakkan implementasi; tata kelola memastikan penggunaan berlangsung secara bertanggung jawab; sedangkan evaluasi menyediakan umpan balik untuk perbaikan. Hasil akhirnya bukan sekadar digitalisasi administrasi, tetapi transformasi kelembagaan yang meningkatkan mutu pendidikan dengan tetap menjaga tujuan moral dan spiritual.

Tabel ini dapat diterapkan secara bertahap. Tahap pertama adalah pemetaan kebutuhan, risiko, dan kesiapan lembaga. Tahap kedua adalah penyusunan kebijakan bersama para pemangku kepentingan. Tahap ketiga adalah penguatan kompetensi dan pelaksanaan program percontohan. Tahap keempat adalah pemantauan serta evaluasi. Tahap kelima adalah revisi kebijakan berdasarkan temuan evaluasi. Urutan tersebut memungkinkan lembaga mengembangkan transformasi secara realistis, terukur, dan sesuai dengan kapasitasnya.

Implikasi bagi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Kerangka yang ditawarkan memiliki implikasi bagi pengelola pendidikan Islam pada tingkat pemerintah maupun satuan pendidikan. Pada tingkat kebijakan, diperlukan pedoman yang memberikan arah umum mengenai penggunaan AI, perlindungan data, integritas akademik, dan tanggung jawab manusia. Pedoman tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, sehingga tidak menghasilkan standar implementasi yang mengabaikan kondisi kelembagaan.

Pada tingkat satuan pendidikan, kepala madrasah dan pimpinan pesantren perlu menerjemahkan pedoman menjadi prosedur operasional yang sesuai dengan kebutuhan. Guru perlu memperoleh pelatihan yang menggabungkan literasi AI, kompetensi pedagogis, verifikasi informasi, dan etika penggunaan teknologi. Peserta didik perlu dibimbing untuk menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti usaha memahami materi dan membangun argumentasi sendiri.

Pada tingkat pengawasan, evaluasi sebaiknya tidak hanya menilai keberadaan kebijakan atau jumlah kegiatan pelatihan. Evaluasi perlu memeriksa konsistensi penerapan aturan, kualitas proses pembelajaran, perlindungan informasi, pemerataan manfaat, dan perubahan kompetensi warga lembaga. Dengan demikian, kebijakan dapat terus disempurnakan berdasarkan kebutuhan aktual, bukan hanya berdasarkan asumsi bahwa teknologi selalu menghasilkan perbaikan.

Secara keseluruhan, transformasi pendidikan Islam di era AI membutuhkan keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian. Lembaga yang menolak seluruh perkembangan teknologi berisiko kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan, sedangkan lembaga yang menerima teknologi tanpa tata kelola berisiko mengabaikan tanggung jawab akademik dan etika. Jalan yang

lebih tepat adalah pemanfaatan AI secara selektif, transparan, berkeadilan, dan terarah pada kemaslahatan pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam di era Artificial Intelligence (AI) memerlukan tata kelola kelembagaan yang terencana, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam, bukan sekadar pengadaan teknologi dan digitalisasi administrasi. Transformasi tersebut perlu didukung oleh kebijakan yang mengatur penggunaan AI, perlindungan data, integritas akademik, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pemimpin pendidikan Islam juga berperan penting dalam menetapkan visi digital, meningkatkan kompetensi pendidik, dan memastikan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Sintesis literatur menghasilkan kerangka transformasi yang mencakup empat dimensi, yaitu kebijakan adaptif, kepemimpinan strategis-humanistik, tata kelola AI berbasis nilai Islam, dan evaluasi berkelanjutan. Nilai amanah, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan tabayyun perlu diterapkan dalam prosedur kelembagaan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, menjaga integritas akademik, memperluas pemerataan akses, dan membentuk karakter peserta didik. Dengan demikian, AI harus diposisikan sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan, bukan pengganti pertimbangan profesional dan tanggung jawab manusia. Namun, kerangka ini masih bersifat konseptual sehingga memerlukan pengujian empiris pada madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dengan karakteristik yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Agil Husain Abdullah, Aripuddin, Nurkhalishah, S. (2025). Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam Dan Peran Pemimpin Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *16*(2), 200–211.

Ahmad, Y. S., Abdulrasaq, Y., Ali, A. M., & Ali, F. (2025). Integrating Islamic Ethical Principles Into Ai Education And Character Building In Digital Society. *Tunjuk Ajar: Journal Of Education And Culture*, *1*(December), 130–146. Https://Doi.Org/10.64929/Ta.V1i2.38

Ayunda, D. S., Liani, N. S., & Elisyah, N. (2025). Pengembangan Kompetensi Soft Skills Digital Mahasiswa Melalui Workshop Etika Ai Dan Literasi Teknologi. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 522–529.

Celik, I. (2023). Towards Intelligent-Tpack : An Empirical Study On Teachers ' Professional Knowledge To Ethically Integrate Artificial Intelligence (Ai) -Based Tools Into Education. *Computers In Human Behavior*, *138*(August 2022), 107468. Https://Doi.Org/10.1016/J.Chb.2022.107468

Chan, C. K. Y. (2023). A Comprehensive Ai Policy Education Framework For University Teaching And Learning. *International Journal Of Educational Technology In Higher Education*, 20:38. Https://Doi.Org/10.1186/S41239-023-00408-3

Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (Ai) In Islamic Ethics : Towards Pluralist Ethical Benchmarking For Ai. *Philosophy & Technology*, 1–24. Https://Doi.Org/10.1007/S13347-023-00668-X

Fullan, M., Azorín, C., Harris, A., Jones, M., Fullan, M., Azorín, C., Harris, A., & Artificial, M. J. (2024). Artificial Intelligence And School Leadership : Challenges , Opportunities And Implications. *School Leadership & Management Formerly School Organisation Issn:*, *2434*, 339–346. Https://Doi.Org/10.1080/13632434.2023.2246856

Hartono, I., & Ilyasin, M. (2025). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Budaya Kerja Guru. *Jider (Journal Of Instructional And Development Researches)*, *5*(1), 86–96.

Kasneci, E. (2023). Chatgpt For Good? On Opportunities And Challenges Of Large Language Models For Education. *Differences, Learning And Individual*, *103*, 102274.

M. Habil Al-Faqih, Rusdiyanur, M. (2025). Epistemologi Islam Sebagai Dasar Etika Pemanfaatan Ai Di Era Society 5.0. *Jider (Journal Of Instructional And Development Researches)*, *5*(6), 648–657.

Mahani, A. T., & Ariyani, N. (2025). Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis

Artificial Intelligence (Ai). *Jider (Journal Of Instructional And Development Researches)*, *5*(6), 668–676.

Mcintire, M. G., Denecke, F. M., & Duarte, B. J. (2024). Understanding The Research And Practical Implications Of Artificial Intelligence In Educational Leadership And Policy : A Systematic Review. *Purdue Ai In P-12 Education Conference*.

Mona Novita, Zulhimma, Zahid Zufar At Thaariq, R. (2024). Ethical Generative Ai Governance In Madrasah: An Empirically Grounded Islamic Educational Leadership Framework. *Edureligia : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *08*(02), 359–374.

Muhamad. (2026). Digital Leadership In Islamic Education : Transforming Madrasah Management For The Era Of Artificial Intelligence. *Anjasmoro (Islamic Interdisciplinary Journal)*, *4*(1), 376–388.

Mustapha, A., Kamaruddin, Z., & Che, S. (2025). An Overview Of Artificial Intelligence (Ai) Issues From The Perspective Of Islamic Jurisprudence. *Online Journal Of Research In Islamic Studies 12(1)*, *12*(1), 95–113.

Nun, L. I., & Mohtarom, A. (2025). The Integration Of Artificial Intelligence As A Teacher ' S Partner In Islamic Religious Education Learning. *Journal Of Islamic Education Research*, *6*(02), 145–162.

Nurul, A., Aqilah, Z., Putri, M., Amran, Z., & Fatdilla, R. (2026). Transformasi Pendidikan Islam Berbasis Artificial Intelegen Peluang Dan Etika Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Ri, Zulvahmi Amran, Rachmat Fatdilla, Herviqa Agriana,* *2*(1), 185–194.

Pidi, H., & Fahlevi, R. (2025). Eksplorasi Nilai-Nilai Etika Digital Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Fondasi Pengembangan Kecerdasan Buatan Etis Di Sekolah. *Pendidikan Kewarganegaraan*, *15*(November).

Primus Sanbein, E. S. (2026). Kecerdasan Buatan Dalam Jaminan Mutu Akademik : Peluang Dan Tantangan. *Teknodik*, *29*, 85–98.

Rifa'i, L. H. (2026). Governing Generative Ai In Islamic Educational Institutions : An Amanah – Adl – Maslahah Framework For Responsible Administration. *Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (Jmpid)*, *8*(2), 258–273.

Rochim, A. N., & Muttaqien, M. I. (2025). Keadilan, Amanah, Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern. *Visi Manajemen*, *11*(2), 01–12.

Sianipar, A., & Angelia, W. (2026). Ai In Education And Online Learning - Educational Leadership For Human-Centred Digital And Artificial Intelligence Transformation. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, *39*(2).

Supriatin, I., Syarifah, S., Susilawati, E., Supriadi, I., & Apriani, R. (2025). Formulasi Etika Kecerdasan Buatan (Ai) Dalam Pendidikan Islam : Pendekatan Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah Dan Tafsir Tematik Al- Qur ' An. *Halaqa : Journal Of Islamic Education*, *1*(2), 121–140.

Supriyono, A., & Prihandono, T. (2024). Dampak Dan Tantangan Pemanfaatan Chatgpt Dalam Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka : Tinjauan Literatur Sistematis. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, *9*, 9–12. Https://Doi.Org/10.24832/Jpnk.V9i2.5214

Syah, B., Aswan, D., Baids, F., & Ichsan, R. (2025). Pelatihan Penggunaan Ai Secara Etis : Menjaga Orisinalitas Dan Integritas Mahasiswa Di Era Digital. *Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *03*(01), 159–167.

Tabassi, E. (N.D.). Artificial Intelligence Risk Management Framework. *National Institute Of Standards And Technology.*

Waliya Purnama Sari, Syarip, Kasinyo Harto, Mardiah Astuti, S. (2026). The Philosophical Dimensions Of Islamic Religious Education (Pai) As A Basis For The Ethical Response To Artificial Intelligence: A Qualitative Study At Sdi Az-Zahrah Palembang. *Journal Of Educational Sciences*, *10*(1), 444–457.

Yusuf, B. (2024). Teknologi Dan Personalisasi Pembelajaran Pendidikan Islam Untuk Generasi Z. *Jider (Journal Of Instructional And Development Researches)*, *4*(4), 277–285.

Yusuf, M., & Sarkar, A. (2026). Ethics Of Using Artificial Intelligence In Islamic Education. *Educatio*, *06*(01), 69–83. Https://Doi.Org/10.69879/Educatia.V2.I1.132

Zhang, S., Zhao, X., Zhou, T., & Kim, J. H. (2024). Do You Have Ai Dependency ? The Roles Of Academic Self-Efficacy , Academic Stress , And Performance Expectations On Problematic Ai Usage Behavior. *International Journal Of Educational Technology In Higher Education*, *0*, 21:34.